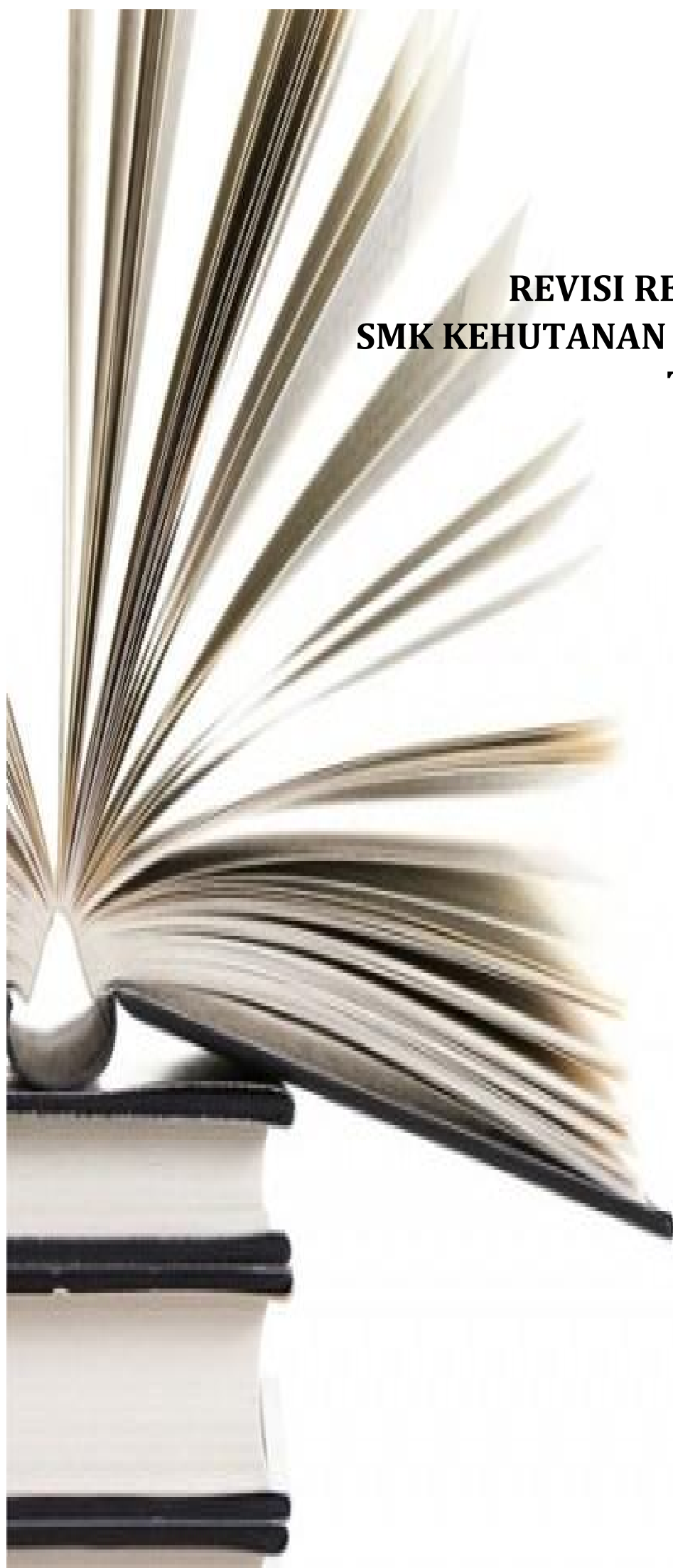


**REVISI RENCANA STRATEGIS
SMK KEHUTANAN NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2020 - 2024**





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KEHUTANAN
MAKASSAR

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MAKASSAR
Nomor : SK.75/SMKKN-4/TU/12/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
MAKASSAR
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa Eselon I wajib menyusun Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian;
 - b. bahwa Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020, perlu disusun dokumen Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 guna mendukung pencapaian target kinerja SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 melalui peraturan Surat Keputusan Kepala SMK Kehutanan Negeri Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 10 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- 12 Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
- 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
- 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919).
- 15 SK Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
- 16 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK KEHUTANAN NEGERI MAKASSAR TENTANG RENCANA STRATEGIS SMK KEHUTANAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Sekolah ini.

Pasal 2

Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam satu periode lima tahunan sesuai kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA SEKOLAH,



Makassar Ari Hidayanto, S.Hut
NIP. 19830202 200912 1 003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Capaian Renstra Tahun 2015-2019	2
C. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2015-2019	2
D. Kerangka Kelembagaan	4
E. Potensi dan Permasalahan	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	21
A. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	21
B. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BP2SDM ..	24
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	28
A. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) SMKKN Makassar	28
B. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan SMKKN Makassar	30
C. Pengarusutamaan	30
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
A. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan	33
B. Target Kinerja	33
C. Kerangka Pendanaan	37
BAB V. PENUTUP	40
LAMPIRAN	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola Kegiatan SMKKN Makassar.....	5
Gambar 3. Jumlah Pendidik per Kelompok Mata Pelajaran.....	9
Gambar 4. Jumlah Tenaga Kependidikan per Urusan Pekerjaan	9
Gambar 5. Jumlah dan Luas Bangunan/Gedung per Kategori.....	10
Gambar 6. Jumlah Peralatan per kategori penggunaan	11
Gambar 7. Proporsi Jam Pelajaran SMKKN Makassar	13



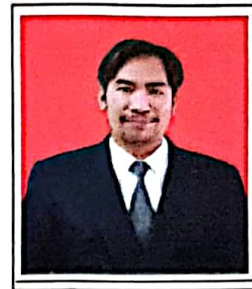
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja SMKKN Makassar Tahun 2015-2019	2
Tabel 2. Jumlah Peserta Didik SMKKN Makassar Tahun 2015-2019.....	2
Tabel 3. Alokasi Sumberdaya Manusia SMKKN Makassar Tahun 2015-2019	3
Tabel 4. Alokasi Pengadaan Sarana Prasarana SMKKN Makassar Tahun 2015-2019	3
Tabel 5. Alokasi Anggaran SMKKN Makassar Tahun 2015-2019.....	4
Tabel 6. Tugas dan Fungsi Masing-masing Unit Organisasi SMKKN Makassar	6
Tabel 7. Tabel jumlah kendaraan bermotor	10
Tabel 8. Rekapitulasi Lokasi Praktek Lapangan Siswa SMK Kehutanan Negeri Makassar	12
Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Pendaftar SMK Kehutanan Negeri Makassar Selama 4 tahun Terakhir	14
Tabel 10. Rekapitulasi Data Sebaran Alumni SMKKN Makassar	14
Tabel 11. Analisis SWOT.....	19
Tabel 12. Sasaran Badan P2SDM Tahun 2020-2024	25
Tabel 13. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM	26
Tabel 14. Sasaran, Indikator dan Target Program BP2SDM Kementerian LHK.....	28
Tabel 15. Sasaran, Indikator dan Target Kegiatan SMKKN Kementerian LHK.....	28
Tabel 16. Sasaran, Indikator dan Target Unit Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Makassar	29
Tabel 17. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan	33
Tabel 18. Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Target Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 19. Sasaran, Indikator dan Target Komponen kegiatan SMKKN Makassar Tahun 2020- 2024	34
Tabel 20. Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Target Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 21. Sasaran, Indikator, Target dan Penanggungjawab Komponen kegiatan SMKKN Makassar Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 22. Rencana Alokasi Pembiayaan SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024	37



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) Makassar Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan sesuai dengan harapan dan target waktu yang telah direncanakan.



RENSTRA SMKKN Makassar Tahun 2020-2024 merupakan dokumen rencana lima tahunan yang berisi langkah-langkah strategis untuk memenuhi sasaran di dalam Renstra unit kerja di atasnya. Penyusunan Renstra ini merujuk pada ketentuan peraturan menteri LHK nomor : P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis lingkup Kementerian LHK tahun 2020-2024 yang di setiap satuan kerja (Satker) lingkup Kementerian LHK wajib untuk menyusunnya.

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra SMKKN Makassar Tahun 2020-2024 adalah untuk menyesuaikan terhadap perubahan organisasi lingkup Badan P2SDM sebagai arah kebijakan dan strategi mendukung pencapaian sasaran kinerjanya dan tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan.

Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat BP2SDM Kementerian LHK yang telah memfasilitasi sekaligus memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Renstra SMKKN Makassar ini, demikian juga kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran, masukan dan ide yang cemerlang.

Harapan kami, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam mengemban setiap tugas dan amanah yang dilekatkan di pundak kita, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.



MUHAMMAD ARI HIDAYANTO, S.HUT

Muhammad Ari Hidayanto, S.Hut
NIP. 19830202 200912 1 003



BAB I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Visi Misi Presiden dan arahan utama presiden yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan dimana salah satunya adalah fokus pada peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan, karena itu SDM merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Mereka harus dapat bersaing secara global, terlebih saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 yang menuntut SDM dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan juga tidak terlepas dari kontribusi SDM yang mengelolanya. Langkah korektif Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya fokus pada kebijakan pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga diikuti dengan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, diperlukan pula SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing serta dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan kebutuhan akan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, salah satu unit organisasi di Kementerian LHK yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDM unggul tersebut, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berperan dalam menjamin ketersediaan SDM LHK yang cukup dengan kualitas dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar merupakan unsur pendukung Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan dalam upaya menyediakan tenaga teknis menengah kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Renstra SMK Kehutanan Negeri Makassar ini juga merupakan bagian dari Renstra BP2SDM Kementerian LHK Tahun 2020-2024.



B. Capaian Renstra Tahun 2015-2019

Capaian kinerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Makassar sebelumnya merupakan bagian satuan unit kerja (Satker) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dalam pencapaian sasaran Renstra SMKKN Makassar sangat penting memperhatikan capaian sasaran Renstra di atasnya yakni capaian sasaran kegiatan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Capaian indikator kinerja unit kegiatan penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan merupakan bagian dari pencapaian indikator kinerja utama jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK; peningkatan kapasitas tenaga pendamping KTH; penyediaan lulusan karyawan baik S2 maupun S3; dan penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.

Tabel 1. Capaian Kinerja SMKKN Makassar Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target Renstra	Capaian 2015 - 2019						
		2015	2016	2017	2018	2019	Σ	%
Jumlah SDM LHK meningkat kapasitasnya (Renstra BP2SDM)	57.640 orang	10.003	4.652	4.024	4.066	5.011	27.756	48,15
Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan (Renstra SMKKN Makassar)	475 orang	59	137	96	90	97	479	100,84

C. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tahun 2015-2019

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan untuk mencapai sasaran kinerja tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) telah mendidik sejumlah 709 siswa yang berasal dari 9 wilayah provinsi layanan dan 1 negara tetangga seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Peserta Didik SMKKN Makassar Tahun 2015-2019

Unit Kegiatan	Jumlah Peserta Didik (Siswa)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	334	286	292	296	304



Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan untuk mencapai sasaran kinerja tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan selama kurun waktu 5 tahun terakhir didukung oleh sejumlah sumberdaya manusia berupa tenaga pendidik (fungsional guru) dan kependidikan (struktural dan staff) seperti terdapat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Alokasi Sumberdaya Manusia SMKKN Makassar Tahun 2015-2019

No.	Sumberdaya Manusia	Jumlah SDM (Orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tenaga Pendidik	18	16	20	21	21
2.	Tenaga Kependidikan	27	27	22	19	19

Sejumlah sarana prasarana dan peralatan pendidikan yang dialokasikan pada pelaksanaan unit kegiatan penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan melalui penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan untuk mencapai sasaran kinerja tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai pendukung pencapaian kinerja SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Alokasi Pengadaan Sarana Prasarana SMKKN Makassar Tahun 2015-2019

No.	Sarana Prasarana dan Peralatan Pendidikan	Jumlah (Unit/Paket)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sarana peralatan pendidikan dan perkantoran	309	523	1105	131	35
2.	Kendaraan bermotor	2	2	0	0	1
3.	Gedung Bangunan	3	2	2	4	2

Pelaksanaan aktivitas unit kegiatan dalam rangka penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan melalui penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan untuk mencapai sasaran kinerja tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) SMK Kehutanan Negeri Makassar mengalokasikan sejumlah anggaran APBN seperti terdapat pada Tabel 5 berikut:



Tabel 5. Alokasi Anggaran SMKKN Makassar Tahun 2015-2019

Unit Kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran (Milyar)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan	11.787	13.194	17.188	19.631	19.623

D. Kerangka Kelembagaan

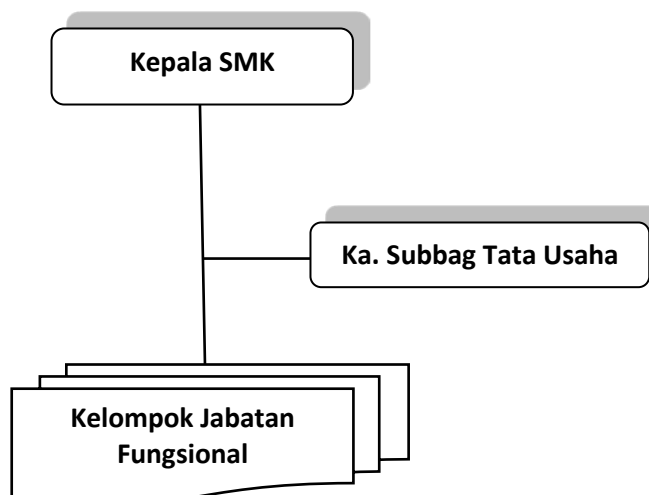
Sesuai Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/Menlhk/ Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program pengajaran
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah
3. Melaksanakan kerjasama pendidikan dan pengajaran
4. Melaksanakan urusan tatausaha dan rumah tangga

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur organisasi SMK Kehutanan Negeri terdiri atas:

1. Kepala sekolah
2. Kepala sub bagian tata usaha
3. Kelompok jabatan fungsional

Adapun struktur organisasi SMK Kehutanan Negeri sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



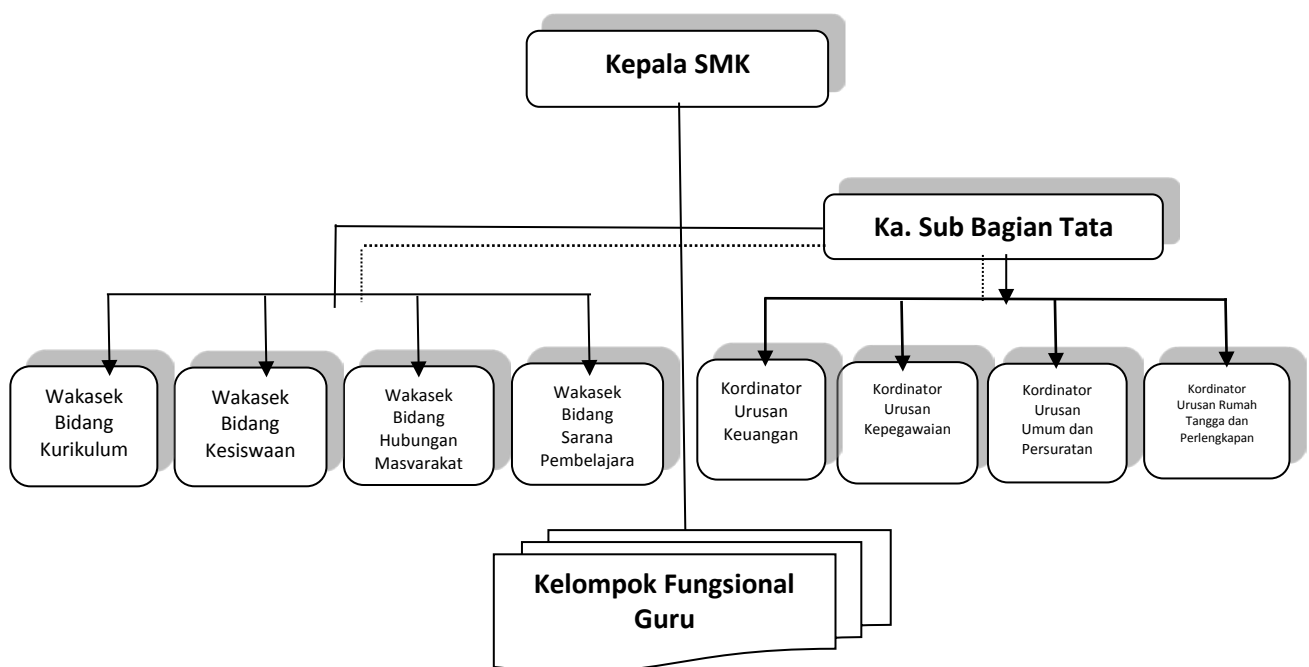
Gambar 1. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan secara operasional dibentuk struktur organisasi pelaksana kegiatan melalui keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar Nomor: SK.01/ SMKKN-IV/01/2020 dengan susunan struktur organisasi terdiri atas :

1. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan (Kepala Sekolah);
 - Wakasek bidang kurikulum
 - Wakasek bidang kesiswaan
 - Wakasek bidang humas
 - Wakasek bidang sarana prasarana
2. Kegiatan dukungan penyelenggaraan pendidikan (Kepala sub bagian tata usaha);
 - Kordinator urusan keuangan
 - Kordinator urusan kepegawaian
 - Kordinator urusan umum dan persuratan
 - Kordinator urusan rumah tangga dan perlengkapan
3. Kelompok fungsional guru

Adapun struktur organisasi pengelola pelaksana kegiatan SMKKN Makassar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola Kegiatan SMKKN Makassar



Berdasarkan struktur organisasi pengelola kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 terkait capaian sasaran dan indikator unit kegiatan dan komponen kegiatan, sehingga masing-masing unit organisasi mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Tugas dan Fungsi Masing-masing Unit Organisasi SMKKN Makassar

Unit Kegiatan	Komponen kegiatan	Unit Organisasi	Tugas	Fungsi
Penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan (UK1)	Penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan (EK1)	Kepala sekolah	Memimpin pelaksanaan pendidikan	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
		Wakasek bidang kurikulum	Membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran	Menyusun program dan melaksanakan pembelajaran Menyusun jadwal pembelajaran Menyusun pembagian tugas guru Mengelola admin guru dan siswa Menyusun anggaran kegiatan Menyusun laporan pelaksanaan Melakukan kordinasi
		Wakasek bidang kesiswaan	Membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan pembinaan siswa	Menyusun program dan melaksanakan pembinaan Menyusun petugas dan jadwal pembinaan Mengelola administrasi pembinaan Menyusun anggaran kegiatan Menyusun laporan pelaksanaan Melakukan koordinasi
		Wakasek bidang humas	Membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan hubungan kerjasama	Menyusun program dan melaksanakan kerjasama Mengelola administrasi kerjasama Menyusun anggaran kegiatan Menyusun laporan pelaksanaan Melakukan kordinasi



Unit Kegiatan	Komponen kegiatan	Unit Organisasi	Tugas	Fungsi
		Wakasek bidang sarpras	Membantu kepala sekolah dalam bidang kebutuhan sarpras pembelajaran	Menyusun program dan menyiapkan sarpras pembelajaran Mengelola administrasi Sarpras Menyusun anggaran kegiatan Menyusun laporan sarpras Melakukan kordinasi
		Kelompok fungsional guru	Melakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu	Menyusun materi pembelajaran Melaksanakan pembelajaran Melakukan penilaian Melakukan kordinasi
	Penyelenggaraan dukungan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (EK2)	Ka.Subbag Tata Usaha	Melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, program dan anggaran, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan Melakukan dukungan layanan pendidikan dan kordinasi
		Kordinator urusan keuangan	Mengkordinir urusan keuangan	Menyusun program dan anggaran Melaksanakan monev dan pelaporan Mengelola administrasi keuangan Melakukan kordinasi
		Kordinator urusan kepegawaian	Mengkordinir urusan kepegawaian	Mengelola administrasi kepegawaian Menyusun laporan kepegawaian Melakukan kordinasi



Unit Kegiatan	Komponen kegiatan	Unit Organisasi	Tugas	Fungsi
		Kordinator urusan umum dan persuratan	Mengkordinir urusan umum dan persuratan	Mengelola administrasi persuratan Menyusun laporan Melakukan kordinasi
		Kordinator urusan rumah tangga dan perlengkapan	Mengkordinir urusan rumah tangga dan perlengkapan	Mengelola administrasi rumah tangga dan perlengkapan Menyusun laporan BMN dan persediaan Melakukan kordinasi

E. Potensi dan Permasalahan

Gambaran atau kondisi riil (existing condition) ini perlu diketahui untuk memetakan potensi dari SMK Kehutanan Negeri Makassar terkait dengan pengembangannya untuk 5 tahun kedepan. Untuk memetakan potensi tersebut, keberadaannya digambarkan dari lingkungan internal dan eksternal yang langsung mempengaruhinya yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis SWOT.

Potensi lingkungan internal akan tergambarkan melalui Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan), sedangkan potensi lingkungan eksternal akan dilihat dari Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Selanjutnya dari pemetaan potensi lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut, dilakukan kajian melalui analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan dan selanjutnya dapat memetakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai profil satuan pendidikan yang telah dirumuskan.

1. Analisis Lingkungan Internal (SW)

Analisis Lingkungan Internal (SW) dilakukan untuk mengetahui Strengths (kekuatan), Weakness (kelemahan) dari keberadaan SMK Kehutanan Negeri Makassar. Adapun Strengths (kekuatan), Weakness (kelemahan) tersebut disajikan sebagai berikut :

a. Strengths (Kekuatan)

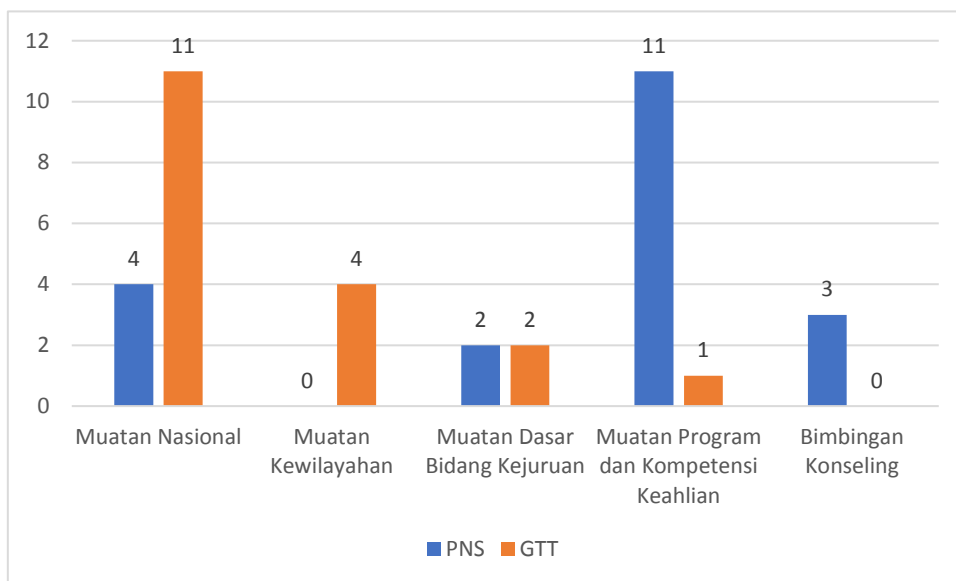
Ada beberapa kekuatan yang dimiliki SMK Kehutanan Negeri Makassar yang dapat digambarkan yaitu:

1. Tersedianya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai.

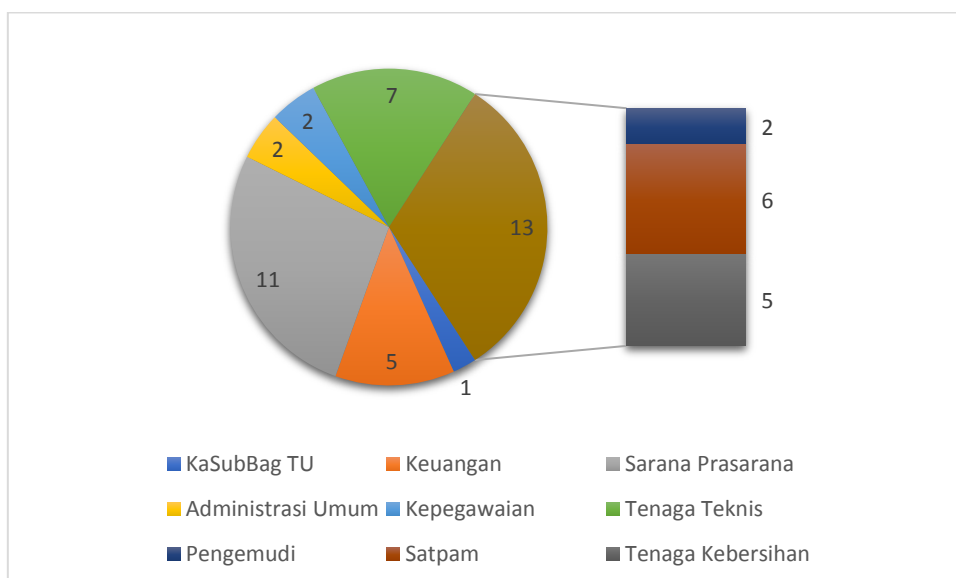
Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Kehutanan Negeri Makassar seperti disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tenaga pendidik (Guru)



sangat memadai dalam menunjang proses belajar mengajar. Mereka pada umumnya merupakan pendidik yang berstatus PNS atau Guru Tetap (GT) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama yang mengajar mata pelajaran wajib, C2 dan C3. Sedangkan pendidik yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) adalah PNS/Non PNS dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya mempunyai pengalaman mengajar yang sudah lama dan sudah bersertifikat pendidik. Demikian juga tenaga kependidikan yang terampil dalam mendukung proses administrasi pengelolaan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.



Gambar 3. Jumlah Pendidik per Kelompok Mata Pelajaran



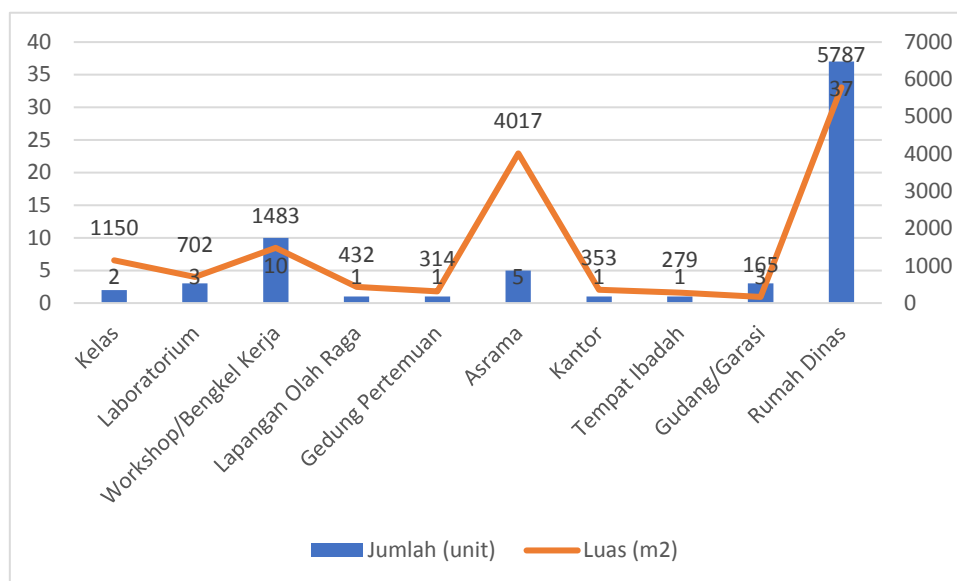
Gambar 4. Jumlah Tenaga Kependidikan per Urusan Pekerjaan

2. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Luas lahan lokasi SMK Kehutanan Negeri Makassar yaitu 5,2602 hektar. Memiliki aksesibilitas yang baik karena lokasinya sangat mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Untuk pengembangan sekolah



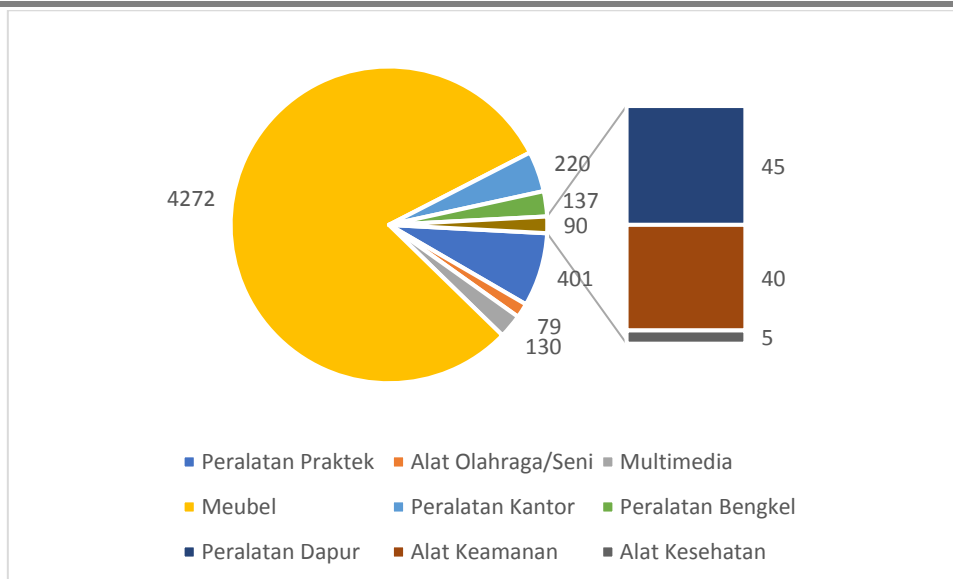
sangat memungkinkan dengan cara menambah luas bangunan. Beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia secara lengkap telah disajikan pada Gambar 5, Tabel 7 dan Gambar 6.



Gambar 5. Jumlah dan Luas Bangunan/Gedung per Kategori

Tabel 7. Tabel jumlah kendaraan bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Mini Bus	1
2	Micro Bus	1
3	Mobil	3
4	Pick Up	1
5	Sepeda Motor	6
6	Kendaraan Bermotor Khusus	1



Gambar 6. Jumlah Peralatan per kategori penggunaan

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana pokok pada SMK Kehutanan Makassar yang meliputi sarana prasarana pembelajaran dan praktek serta sarana prasarana pendukung telah memenuhi standar sarana prasarana SMK sesuai dengan Permendiknas Nomor 34 Tahun 2018 terkait Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian fasilitas sarana dan prasarana tersebut perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

3. Tersedianya Lokasi Praktek Peserta Didik

Selain sarana dan prasarana seperti tersebut di atas, SMK Kehutanan Negeri Makassar juga ditunjang oleh lokasi praktek sekolah untuk mata pelajaran program kejuruan dan paket kejuruan berupa Arboretum, Persemaian, Penangkaran kupu-kupu, kebun bibit murbei berada pada lokasi SMK Kehutanan Negeri Makassar, serta Hutan Pendidikan dan Pelatihan Tabo-Tabo milik Balai Diklat Kehutanan Makassar yang terletak di Kabupaten Pangkep yang berjarak 70 km dari SMK Kehutanan Negeri Makassar dengan luasan kurang lebih 600 hektar. Pada Hutan Diklat tersebut telah dibagi lokasi praktek dalam bentuk demonstrasi plot dan model pengelolaan.

Lokasi praktek lainnya yaitu adanya beberapa instansi Unit Pelaksana Teknis Kehutanan seperti Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Taman Nasional, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDAE), Balai Pengelolaan DAS (BPDAS), Balai Penataan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Penelitian dan Pengembangan LHK, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) serta dan lokasi KPH yang berada pada wilayah pelayanan SMK Kehutanan Negeri Makassar.

Kegiatan Praktek Lapangan pada DU/DI Kehutanan telah dilaksanakan di beberapa lokasi sesuai dengan paket keahlian masing-masing. Rekapitulasi tempat praktek lapangan seperti pada Tabel 8.



Tabel 8. Rekapitulasi Lokasi Praktek Lapangan Siswa SMK Kehutanan Negeri Makassar

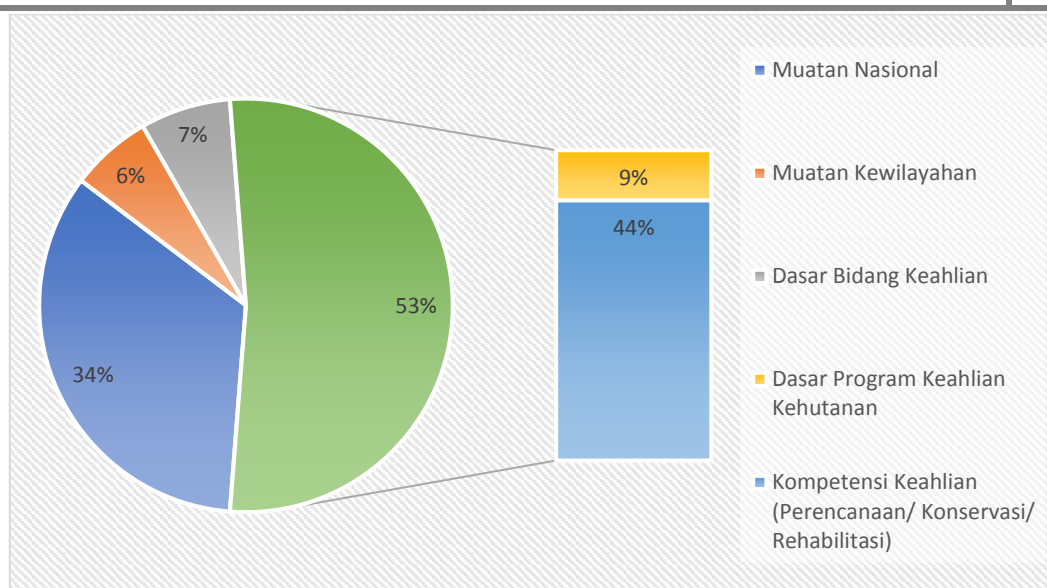
No	Paket Keahlian	Lokasi Praktek
1.	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	Areal IUPHHK-HA Kalimantan Tengah
		Perum Perhutani
2.	Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	Taman Nasional Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
		Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Tengah
3.	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Areal IUPHHK-HT di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
		Perusahaan Pertambangan (PT. Vale Sorowako, PT. Semen Tonasa Pangkep, PT. Semen Gresik, PT. Kitadin Kalimantan Timur)

Melihat dari uraian di atas, tergambar bahwa, tempat praktek yang berada di lokasi sekolah, di hutan diklat, lokasi KPH, UPT Kementerian LHK serta DU/DI merupakan kekuatan yang perlu di kembangkan. Pengembangan dari lokasi praktek tersebut diarahkan untuk menyediakan teaching factory, unit produksi serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) bagi peserta didik.

4. Telah Menggunakan Kurikulum 2013 Edisi Revisi

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar telah menggunakan Kurikulum 2013 edisi revisi sejak Tahun Ajaran 2018/2019. Struktur kurikulumnya meliputi kelompok mata pelajaran wajib dan kejuruan. Selain itu, diprogramkan kelompok mata pelajaran muatan lokal yang disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kondisi wilayah. Proporsi struktur kurikulum yang diterapkan pada SMK Kehutanan Negeri Makassar seperti pada Gambar 7.

Melihat dari struktur kurikulum, diperlukan adanya penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Dengan demikian akan diperoleh kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum pada Dinas Pendidikan Provinsi. Selain itu, masih diperlukan peningkatan terutama pada proses pembelajarannya. Adapun proses pembelajaran yang sebaiknya dikembangkan antara lain : Menerapkan pendekatan ilmiah dan penilaian autentik, menggunakan teknologi informasi dan komputerisasi, mengembangkan pembelajaran bahasa asing lain selain bahasa Inggris, mengembangkan pembelajaran praktik menggunakan alat sesuai tuntutan kompetensi, menerapkan pembelajaran berbasis Entrepreneurship serta Melibatkan Industri dalam proses pembelajaran dan penilaian.



Gambar 7. Proporsi Jam Pelajaran SMKKN Makassar

5. Paket Keahlian Yang Dibuka Mempunyai Daya Saing

Pendidikan tingkat menengah kehutanan adalah pendidikan formal berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan yang dibuka dengan bidang keahlian : agribisnis dan agroteknologi dan program keahlian : kehutanan serta memiliki 4 (empat) paket keahlian sebagaimana tercantum dalam struktur kurikulum. Pada SMK Kehutanan Negeri Makassar telah dibuka 3 Paket Keahlian : 1) Teknik Inventarisasi dan pemetaan Hutan; 2) Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan; 3) Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Beberapa alasan dan pertimbangan yang mendasari paket keahlian dimaksud mempunyai daya saing antara lain adalah :

- Tenaga teknis menengah kehutanan yang handal sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan yang masih dibutuhkan oleh instansi pemerintahan serta DU/DI bidang Kehutanan. Lulusan SMK Kehutanan masih sangat dibutuhkan sebagai tenaga teknis di KPH, pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, PIAPS (Pemegang Izin Akses Perhutanan Sosial).
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan memiliki komitmen yang tinggi untuk membina penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengusahakan peningkatan jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dibandingkan dengan Sekolah Menengah Umum.

6. Potensi Peserta Didik Cukup Banyak

Potensi peserta didik sangat ditentukan oleh besarnya minat masyarakat (peserta didik SLTP) untuk masuk mengikuti pendidikan di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Berdasarkan rekapitulasi pendaftar 4 tahun terakhir yang disajikan pada Tabel 9 terlihat bahwa minat untuk mengikuti pendidikan di SMK Kehutanan



Negeri Makassar dalam kurun waktu empat tahun terakhir meningkat . Namun demikian, minat masyarakat tersebut masih perlu dibangun melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berupa : perbaikan sistem promosi/publikasi, sistem penerimaan on line, standarisasi soal test, sistem dan standar penilaian, sistem perekrutan dan lain-lain.

Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Pendaftar SMK Kehutanan Negeri Makassar Selama 4 tahun Terakhir

Jumlah Pendaftar Tahun				Keterangan
2016	2017	2018	2019	
1105	1105	1120	835	↑

7. Lulusan SMK Kehutanan Memiliki Daya Saing

Kualitas dari satuan pendidikan kejuruan sangat ditentukan oleh besarnya lulusan terserap didunia kerja. Lulusan SMK Kehutanan Negeri Makassar dari Tahun 2012 hingga Tahun 2019 berjumlah 662 orang. Lulusan SMK Kehutanan Negeri Makassar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta Kehutanan (SK), Karyawan Swasta Non Kehutanan (SNK), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Rekapitulasi data sebaran alumni SMK Kehutanan Negeri Makassar seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Rekapitulasi Data Sebaran Alumni SMKKN Makassar

Jumlah Yang Bekerja						Jumah Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Jumlah Yang Belum Bekerja
PNS	SK	SNK	BUMN	KPH/ Kontrak	TNI/ POLRI		
85	62	6	24	233	14	141	98

Keterangan : PNS = Pegawai Negeri Sipil; SK = Swasta Kehutanan; SNK = Swasta Non Kehutanan

8. Organisasi Sekolah Telah Tersedia

SMK Kehutanan Negeri Makassar yang telah berdiri kurang lebih 12 (dua belas) tahun, telah dapat memenuhi standarisasi organisasi pengelolaan yang telah digariskan. Capaian dari organisasi ini tergambar dari telah adanya izin operasional sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor 421.3/7238/S.KEP/DPK/XI/2016, telah memiliki nomor (kode) sekolah (NSS : 321196012086, NIS : 320860 NPSN : 4031423), serta telah terakreditasinya sekolah oleh lembaga yang



berwenang dengan predikat (A) untuk 3 paket keahlian. Sejalan dengan perkembangan organisasi dimaksud, perlu dilakukan peningkatan dalam bentuk : penggunaan aplikasi dan teknologi TIK, peningkatan layanan administrasi sekolah serta peningkatan layanan administrasi kesiswaan.

b. Weakness (Kelemahan)

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh SMK Kehutanan Negeri Makassar. Kelemahan tersebut sebagai berikut:

1. Belum Terlaksananya Semua Proses Pembelajaran Sesuai Standar

Proses pembelajaran dan sistem penilaian yang dilaksanakan pada SMK Kehutanan Negeri Makassar masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Sebagian besar proses pembelajaran masih dilaksanakan secara konvensional. Proses pembelajaran tersebut sebaiknya dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan dan perkembangan teknologi. Pembimbingan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih sangat dibutuhkan. Pembelajaran juga perlu diarahkan ke pembelajaran milenial dengan pendekatan aplikasi teknologi seperti pemanfaatan aplikasi Rumah Belajar disetiap mata pelajaran.

2. Sarana Dan Prasarana Berbasis TIK Belum Optimal

SMK Kehutanan Makassar sebagian besar telah memiliki sarana prasarana berupa gedung dan fasilitas sekolah, fasilitas pembelajaran sekolah, fasilitas pembelajaran praktek serta fasilitas umum. Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah tersedia, namun masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

3. Jumlah dan Keterbaruan Peralatan Praktek Masih Kurang

Salah satu karakteristik dari Sekolah Menengah Kejuruan adalah membutuhkan ketersediaan fasilitas peralatan praktek sesuai dengan dunia kerja (link and match). Dalam kurun waktu hampir 12 tahun penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Makassar, peralatan praktek yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran masih kurang dan peralatan yang ada masih perlu di up grade ke peralatan praktek yang sesuai dengan teknologi.

4. MoU belum ada untuk semua tempat Praktek dan hanya terbatas tempat praktek.

MoU (Memorandum of Understanding) dibutuhkan sebagai wujud link and match dengan DU/DI. SMK Kehutanan Negeri Makassar telah mewujudkan kerjasama dengan beberapa instansi kehutanan (Taman Nasional), IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, pemegang ijin usaha pertambangan. Akan tetapi, MoU yang terwujud hingga 2019 hanya pada beberapa perusahaan. Selain itu, MoU yang ada hanya sebatas pada tempat praktek, belum memasukkan peluang keterserapan alumni pada DU/DI.

5. Masih kurangnya fasilitas asrama



Jumlah peserta didik yang diterima setiap tahun sebanyak 102 orang atau 3 kelas, sehingga jumlah total peserta didik dalam satu tahun (Kelas X, XI, XII) kurang lebih 306 orang. Sementara nisbah jumlah kamar asrama di SMK Kehutanan Negeri Makassar belum sesuai dengan jumlah siswa yang layak menghuni untuk satu kamar.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (OT)

Analisis Lingkungan Eksternal (OT) dilakukan untuk mengetahui opportunities (peluang) dan threats (ancaman) yang mempengaruhi penyelenggaraan dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Adapun opportunities (peluang) dan threats (ancaman) tersebut disajikan pada uraian sebagai berikut :

a. Opportunities (Peluang)

Ada beberapa peluang yang mempengaruhi penyelenggaraan dan SMK) Kehutanan. Peluang tersebut antara lain adalah :

1. Potensi Lapangan Pekerjaan Bagi Lulusan Cukup Tersedia

Potensi lapangan pekerjaan bagi tenaga teknis menengah kehutanan yang dihasilkan dari SMK Kehutanan Negeri Makassar, dapat berada di sektor pemerintahan, pada dunia usaha kehutanan serta pada BUMN. Lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki oleh tenaga teknis meliputi :

- Sektor Pemerintah : Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, Instruktur Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan, Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS), Teknisi Litkayasa, Tenaga Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Sektor Swasta/Sektor BUMN : Tenaga Teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Tenaga Teknis Menengah Kehutanan.
- Perhutanan Sosial : Tenaga pendamping perhutanan social meliputi skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Konservasi (KK).

2. Terbukanya Kewirausahaan Di Bidang Kehutanan

Dengan adanya kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan untuk mengembangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat, membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Lulusan SMK Kehutanan dapat berwirausaha pada bidang usaha tersebut. Bidang wirausaha yang diharapkan mampu dilaksanakan bagi lulusan :

- Kegiatan aneka usaha kehutanan seperti budidaya lebah madu, budidaya ulat sutra, budidaya rotan dan lain-lain merupakan lapangan berwirausaha di bidang kehutanan yang mempunyai prospek cerah.



- Lulusan SMK Kehutanan juga dapat menjadi pengusaha bibit dan penangkar tanaman langka.
- Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dapat berusaha dibidang jasa lingkungan yaitu wisata dan olah raga tantangan.

3. Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan SMK

Dewasa ini perhatian pemerintah kepada Sekolah Menengah Kejuruan semakin besar. Hal ini terlihat dari adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pemabangunan dan penganggaran. Pemerintah untuk menempatkan SMK yang memberikan porsi penyiapan anggaran yang cukup untuk pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan.

4. Adanya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang peningkatan kualitas penyelenggaraan SMK Kehutanan. Salah satu teknologi yang sekarang berkembang adalah teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dimanfaatkan di bidang kehutanan, kultur jaringan tanaman, serta pemanfaatan beberapa aplikasi pembelajaran seperti pengembangan aplikasi untuk proses pembelajaran seperti Rumah Belajar dan aplikasi untuk kegiatan penilaian (Ujian Berbasis Komputer) . Disamping itu, ilmu dan teknologi bidang kehutanan juga terus berkembang yang dapat digunakan untuk pengembangan SMK Kehutanan Negeri Makassar.

5. Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan

Dengan telah diterbitkannya Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kehutanan memberikan arah perancangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi lulusan SMK Kehutanan. Standar kompetensi lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK Kehutanan adalah standar khusus dan standar internasional.

6. Terbukanya Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SMK Kehutanan

Pembinaan SMK Kehutanan Negeri Makassar dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Pendidikan. Disamping kedua kementerian tersebut, pembinaan SMK Kehutanan Negeri Makassar dapat juga melibatkan para pihak seperti negara-negara maju di bidang pendidikan, pemerintah daerah, perusahaan sektor kehutanan, BUMN sektor kehutanan.

7. Adanya perkembangan teknologi ke arah revolusi industri 4.0

Perkembangan teknologi ke arah revolusi 4.0 memungkinkan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengakses informasi seluas mungkin dalam waktu cepat dan di era 4.0 memudahkan komunikasi antar berbagai pihak sehingga dapat mempercepat proses pembelajaran.



b. Threats (Hambatan)

Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pengembangan SMK Kehutanan Negeri Makassar dalam penyelenggaraan dan pembinaannya. Hambatan tersebut antara lain adalah :

1. Adanya Kekhawatiran (Output) Lulusan Pendidikan : Mutu Lulusan Yang Tidak Mampu Bersaing Di Pasar Kerja

Kualitas lulusan sangat mempengaruhi eksistensi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang mempengaruhi kualitas lulusan salah satunya adalah proses pembelajaran yang belum terstandar. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa beberapa komponen yaitu : kemampuan peserta didik, tenaga pendidik, pembiayaan, metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta kurikulum. Berkaitan dengan hal dimaksud, seluruh komponen tersebut seharusnya di kelola secara optimal sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

2. Adanya Kekhawatiran Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan lulusan SMK Kehutanan Negeri sangat dipengaruhi oleh keberadaan dunia kerja sektor kehutanan. Lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh kondisi dan komitmen dunia usaha, kebijakan pemerintah serta faktor-faktor lainnya.

Kekhawatiran bagi penyelenggara terhadap penyerapan lulusan SMK Kehutanan dewasa ini cukup beralasan. Hal ini disebabkan oleh, dunia usaha sektor kehutanan mengalami banyak tantangan. Banyak izin-izin pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan tidak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, banyak Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah terbentuk belum berjalan dengan optimal. Kondisi ini menjadi hambatan dalam penyerapan lulusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi penyelenggaraan dan pembinaan SMK Kehutanan.

2. Adanya perkembangan teknologi ke arah revolusi industri 4.0

Revolusi industri 4.0 dapat menjadi tantangan bagi Lulusan SMK Kehutanan Makassar. Pada era 4.0, sebagian besar pekerjaan diselesaikan oleh mesin sehingga lulusan SMK Kehutanan dituntut untuk memiliki soft skill yang tidak dapat diselesaikan oleh mesin berupa kreativitas, kecerdasan emosional, kemampuan kerjasama dengan orang lain, fleksibilitas dan kemampuan lainnya yang tidak dimiliki oleh mesin.

3. Analisis SWOT

Dari pemetaan potensi lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut, dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan dan selanjutnya memetakan program dan kegiatan.



Tabel 11. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>Strengths (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai. 2. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Tersedianya Lokasi Praktek Peserta Didik 4. Telah Menggunakan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 5. Paket Keahlian Yang Dibuka Mempunyai Daya Saing 6. Potensi Peserta Didik Cukup Banyak 7. Lulusan SMK Kehutanan Memiliki Daya Saing 8. Organisasi Sekolah Telah Tersedia 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Terlaksananya Semua Proses Pembelajaran Sesuai Standar 2. Sarana Dan Prasarana Berbasis TIK Belum Optimal 3. Jumlah dan Keterbaruan Peralatan Praktek Masih Kurang 4. MoU belum ada untuk semua tempat Praktek dan hanya terbatas tempat praktek. 5. Masih kurangnya fasilitas asrama
<p>Opportunities (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Lapangan Pekerjaan Bagi Lulusan Cukup Tersedia 2. Terbukanya Kewirausahaan Di Bidang Kehutanan 3. Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan SMK 4. Adanya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 5. Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Bidang Kehutanan 6. Terbukanya Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SMK Kehutanan 7. Adanya perkembangan teknologi ke arah revolusi industri 4.0 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru 2. Pembuatan SOP pembinaan peserta didik 3. Penyelenggaraan masa orientasi peserta didik baru 4. Peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling 5. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan diri 6. Penyelenggaraan kegiatan penilaian menggunakan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan kesulitan peserta didik 7. Penyelenggaraan sistem blok 8. Penyusunan dokumen pendukung kurikulum (KTSP, Silabus, RPP) sesuai standar 9. Pengembangan unit produksi dan teaching <i>factory</i> 10. Pengadaan sistem administrasi berbasis TIK 11. Perumusan rencana strategis dengan tujuan yang jelas. 12. Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) sekolah 13. Perumusan RKAS/RKAKL dengan melibatkan Komite Sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan 14. Melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah secara berkelanjutan untuk melihat 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan soft skill dunia usaha kehutanan di lapangan 2. Pelaksanaan supervisi akademik 3. Pengembangan media sosial sekolah 4. Pelaksanaan manajemen mutu 5. Pemenuhan standar sarana ruang pembelajaran umum dan khusus 6. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan teknologi 7. Pemenuhan standar sarana ruang penunjang (ruang makan, asrama, sarana olahraga) 8. Pengembangan sarana Pengelolaan lingkungan 9. Pengadaan kendaraan operasional sekolah 10. Pemeliharaan sarana prasarana sekolah



	dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar 15. Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai analisis beban kerja	
<p>Threats (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kekhawatiran (Output) Luaran Pendidikan : Mutu Lulusan Yang Tidak Mampu Bersaing Di Pasar Kerja 2. Adanya Kekhawatiran Ketersediaan Lapangan Pekerjaan 3. Adanya perkembangan teknologi ke arah revolusi industri 4.0 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan soft skill dunia usaha kehutanan di lapangan 2. Penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik 3. Penyelenggaraan pendidikan sistem ganda 4. Peremajaan sarana-prasarana pembelajaran sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran 2. Penyelenggaraan proses penilaian akhir bersama dunia usaha kehutanan 3. Kerjasama dengan dunia usaha kehutanan terkait penilaian akhir dan perekrutan alumni dalam bentuk MoU 4. Peningkatan kompetensi pendidik (professional dan pedagogik) sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

A. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah: **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : **“KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni : **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi KLHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik



Sebagai penjabarannya, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dari KLHK untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Kementerian LHK juga memiliki 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis untuk mempercepat dalam mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:

1. Kesenjangan gender
2. Tata kelola pemerintahan yang baik
3. Pembangunan berkelanjutan
4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
5. Modal sosial dan budaya
6. Transformasi digital

Rumusan tujuan KLHK disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, rumusan visi dan misi KLHK, serta penyelarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Tujuan KLHK adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM KLHK;
5. Meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sasaran strategis KLHK disusun dengan menjabarkan tujuan KLHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi KLHK, rumusan sasaran strategis KLHK adalah:

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS-1)

Indikator pada SS-1 adalah:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);



- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;
- Penurunan Laju Deforestasi;
- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
- Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;
- Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*)

2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (SS-2)

Indikator pada SS-2 adalah:

- Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;
- Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;
- Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (SS-3)

Indikator pada SS-3 adalah:

- Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;
- Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat

4. Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)

Indikator pada SS-4 adalah:

- Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan;
- Penyelesaian Kasus bidang LHK;
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE);
- Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif;
- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK;
- Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;
- Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK;
- Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.



B. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

BP2SDM

Mengacu pada arahan Presiden yang menyatakan bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka visi misi Badan P2SDM juga mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Selain itu Visi BP2SDM juga mengacu pada rumusan Visi KLHK yaitu **“KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**.

Dengan mengacu pada misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Badan P2SDM memiliki program dan kegiatan yang berfokus untuk mendukung terlaksananya semua misi KLHK yang sudah dirumuskan yaitu: (1) Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing; serta (4) Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik. Berdasarkan tugas dan fungsi BP2SDM, misi KLHK yang sangat terkait langsung dengan BP2SDM adalah misi ketiga.

Berdasarkan visi, misi KLHK yang telah dijelaskan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **“Meningkatkan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat dan memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 KLHK yaitu **“Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)”**. Indikator utama yang didukung oleh Badan P2SDM yaitu (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (3) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK; dan (4) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK. Untuk mendukung indikator utama tersebut, Badan P2SDM memiliki 5 (lima) indikator kinerja program dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan.

Badan Penyuluhan pada Tahun 2020-2024 melaksanakan kegiatan melalui Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran utama program adalah Meningkatkan Daya Saing SDM LHK. Badan P2SDM mendukung sasaran strategis 4 Kementerian LHK yaitu **“Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan**



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)”. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 5 (lima) target indikator kinerja program sesuai dengan Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Sasaran Badan P2SDM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama KLHK	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IKU-13)	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat (SP-1)	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat (IKP-1)
	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK (IKU-19)	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK (SP-2)	Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK (IKP-2)
			Lembaga pelatihan pemagangan usaha masyarakat (IKP-3)
			Jumlah lembaga / komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup (IKP-4)
	Level Maturitas SPIP KLHK (IKU- 20)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (SP-3)	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (IKP-5)
Opini WTP atas Laporan Keuangan LHK (IKU-18)			

Untuk mencapai target sasaran dan IKP tersebut, penyelenggaraan kegiatan Badan P2SDM dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK;
3. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Berdasarkan program pada Badan P2SDM, terdapat enam kegiatan pada lingkup Badan P2SDM. Untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan, sasaran dan indikator kinerja disusun secara relevan seperti yang tercantum pada Tabel 13 berikut:



Tabel 13. Sasaran Kegiatan Lingkup Badan P2SDM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Perencanaan Pengembangan SDM	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK
		Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
		Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten
		Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK
		SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)/Hutan Diklat	Nilai KHDTK yang dikelola
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
		Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan berbudaya lingkungan
Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah KTH Mandiri
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)
		Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (K6)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
		Level Maturitas SPIP
		Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK



BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

A. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) SMKKN Makassar

Unit kegiatan merupakan instrument turunan dari program dan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan strategis kementerian yang berada pada level eselon II dan UPT. Unit kegiatan yang dilaksanakan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, berisikan satu aktivitas kegiatan dan satu atau lebih komponen kegiatan yang sejalan dengan sasaran strategis (S4), sasaran program (P2) dan sasaran kegiatan (K3) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan sasaran program (P2) yaitu meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM LHK dan sasaran kegiatan (K3) yaitu Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, selanjutnya secara terstruktur disusunlah sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja unit kegiatan (UK) dan komponen kegiatan (EK) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 14 Berikut :

Tabel 14. Sasaran, Indikator dan Target Program BP2SDM Kementerian LHK

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020-2024
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Jumlah SDM LHK kompeten dan tersertifikasi 52.514 orang

Untuk memenuhi target program peningkatan produktivitas dan daya saing SDM LHK hingga tahun 2024, sesuai tugas dan fungsi yang diemban unit kerja SMK Kehutanan Negeri selama 5 tahun (2020-2024) telah dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagaimana Tabel 15 berikut :

Tabel 15. Sasaran, Indikator dan Target Kegiatan SMKKN Kementerian LHK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020-2024
Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat 2.364 orang

Berdasarkan target kegiatan penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang telah ditetapkan BP2SDM kepada lima SMKKN kementerian LHK dalam rangka mendukung tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan hingga tahun 2024, sesuai tugas dan fungsi yang diemban unit kerja SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 yaitu kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah



kejuruan kehutanan untuk menghasilkan tenaga teknis telah dijabarkan dalam bentuk satu unit kegiatan sebagaimana Tabel 16 berikut :

Tabel 16. Sasaran, Indikator dan Target Unit Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Makassar

Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Target 2020-2024
Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 503 orang	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 503 orang

Dalam rangka memenuhi target yang ingin dicapai dari pelaksanaan unit kegiatan untuk menyediakan sejumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan diperlukan strategi pengembangan yang terarah. Strategi pengembangan penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 dilakukan sesuai dengan hasil analisis SWOT. Berdasarkan empat strategi pengembangan hasil analisis SWOT, dapat disusun beberapa program pengembangan yang dibagi kedalam 6 (enam) fokus pengembangan sesuai dengan kebijakan revitalisasi SMK Kehutanan, yaitu:

1. Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Fokus pengembangan ini bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran dilaksanakan dan kurikulum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan DUDI sehingga lulusan SMK Kehutanan dapat lebih diterima sebagai pekerja dan berpeluang membuka usaha di bidang kehutanan. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi kebutuhan kurikulum dari DUDI dan pemutakhiran metode pembelajaran dan penilaian yang memastikan peserta didik memiliki kompetensi yang cukup untuk memasuki lapangan kerja atau dunia usaha.

2. Peserta Didik

Fokus pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, khususnya soft skill yang dibutuhkan untuk memasuki lapangan kerja dan dunia usaha sehingga profil lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan DUDI. Selain itu perlu ditingkatkan keberpihakan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan yang memiliki motivasi lebih tinggi untuk menjadi tenaga teknis menengah kehutanan.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses pendidikan dan pembinaan. Selain itu juga diperlukan pemenuhan kebutuhan PTK sesuai dengan analisis kebutuhan sehingga organisasi dapat berjalan lebih efektif.



4. Sarana Prasarana

Fokus pengembangan ini bertujuan untuk memastikan program pendidikan dan pembinaan peserta didik dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran dan penunjang yang memadai, up to date dan terpelihara dengan baik. Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk pengembangan KHDTK disesuaikan dengan kebutuhan DUDI.

5. Sertifikasi Lulusan

Fokus pengembangan ini bertujuan untuk memastikan lulusan yang dihasilkan dapat langsung diterima bekerja di DUDI karena memiliki sertifikat sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Proses sertifikasi dilakukan secara efisien dengan menggunakan LSP P1 dan secara efektif menggunakan skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI dan terpercaya dengan melibatkan DUDI dalam proses penilaiannya.

6. Kerjasama Pengelolaan

Fokus pengembangan ini bertujuan memastikan kegiatan pengelolaan sekolah lebih terarah dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaiannya.

Melalui strategi pengembangan yang melandasi pelaksanaan dari unit kegiatan yang dilakukan oleh SMK Kehutanan Negeri Makassar memiliki target tahunan untuk mendukung keberhasilan pembangunan program dan kegiatan BP2SDM yang bermuara pada keberhasilan pembangunan kementerian LHK.

B. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan SMKKN Makassar

Komponen kegiatan merupakan instrument turunan dari kegiatan dan unit kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan program, kegiatan dan unit kegiatan ditingkat tapak di level eselon III dan Eselon IV. Dalam satu unit kegiatan dapat terdiri dari satu atau beberapa komponen kegiatan dan merupakan cerminan pencapaian sasaran kinerja unit kegiatan sesuai tugas dan fungsi sebagai institusi ditingkat tapak.

Komponen kegiatan yang dilaksanakan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) melaksanakan dua aktivitas komponen kegiatan yaitu penyelenggaraan pendidikan (EK1) dan dukungan penyelenggaraan pendidikan (EK2). Dua komponen kegiatan tersebut secara bersama-sama untuk mendukung dan sejalan dengan Unit Kegiatan dalam rangka penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan (UK1).

C. Pengarusutamaan

Salah satu dasar kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pengarusutamaan. Kementerian LHK memiliki 6 (enam) kebijakan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif untuk mencapai target-target pembangunan nasional, yaitu:



1. Kesetaraan gender

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian LHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan percepatan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK antara lain melalui: (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (f) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG.

2. Tata kelola pemerintahan yang baik

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pembangunan berkelanjutan

Kebijakan Kementerian LHK dalam pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kementerian LHK dalam mengurangi kerentanan bencana, yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.



5. Modal sosial dan budaya

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan pada 4 (empat) program prioritas, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, (2) Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, (3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

6. Transformasi digital

Kebijakan Kementerian LHK dalam pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan Big Data.

SMKKN Makassar akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan keenam kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK.



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Peta sasaran program, sasaran kegiatan dan komponen kegiatan pada Tabel 17 merupakan adopsi dari peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) Renstra BP2SDM Tahun 2020 – 2024.

Tabel 17. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
IKP.02- Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Orang	IKK.09-Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Orang & Kegiatan
				Penyelenggaraan Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Bulan & Kegiatan

B. Target Kinerja

Perkiraan capaian target indikator unit kegiatan SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Target Tahun 2020-2024

Unit Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Perkiraan Capaian Target					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
Penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	94	105	99	101	102	501
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 501 orang						

Sasaran dan indikator komponen kegiatan yang ingin dicapai SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024, disajikan pada Tabel 19 berikut :



Tabel 19. Sasaran, Indikator dan Target Komponen kegiatan SMKKN Makassar Tahun 2020-2024

Sasaran Komponen kegiatan	Indikator Kinerja Komponen kegiatan	Target 2020-2024
Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 501 orang Jumlah dokumen dan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 475 orang Jumlah dokumen dan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan
Terselenggaranya Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah layanan dukungan penyelenggaraan pendidikan 60 bulan Jumlah dokumen dan laporan dukungan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan Jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan 14 kegiatan	Jumlah layanan dukungan penyelenggaraan pendidikan 60 bulan Jumlah dokumen dan laporan dukungan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan Jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan 14 kegiatan

Target yang ingin dicapai dari pelaksanaan komponen kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan dukungan penyelenggaraan pendidikan untuk menyediakan sejumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan diperlukan strategi pengembangan yang terarah. Strategi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan dukungan pendidikan agar dapat menghasilkan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 dilakukan melalui 6 fokus pengembangan: pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran; peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana prasarana; sertifikasi lulusan; dan kerjasama pengelolaan.

Melalui strategi pengembangan yang melandasi pelaksanaan dari setiap komponen kegiatan yang dilakukan oleh SMK Kehutanan Negeri Makassar perlu memiliki target tahunan untuk mendukung keberhasilan pembangunan program dan kegiatan BP2SDM dan unit kegiatan SMK Kehutanan Negeri Makassar yang bermuara pada keberhasilan pembangunan kementerian LHK. Perkiraan capaian target indikator komponen kegiatan SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 20.



Tabel 20. Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Target Tahun 2020-2024

Komponen kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Perkiraan Capaian Target					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan						
	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 475 orang	94	105	99	101	102	501
	Jumlah dokumen dan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan	4	4	4	4	4	20
Penyelenggaraan Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Terselenggaranya Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan						
	Jumlah layanan dukungan penyelenggaraan pendidikan 60 bulan	12	12	12	12	12	60
	Jumlah dokumen dan laporan dukungan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan	4	4	4	4	4	20
	Jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan 14 kegiatan	3	3	3	3	2	14

Komponen kegiatan yang dilaksanakan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) dalam pelaksanaannya selain perlu strategi pencapaian juga tidak terlepas dari peran dan fungsi sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja. Alokasi potensi sumberdaya manusia SMK Kehutanan Negeri Makassar dalam rangka mewujudkan capaian sasaran dan indikator kinerja pada level komponen kegiatan penyelenggaraan pendidikan (EK1) dan penyelenggaraan dukungan pendidikan (EK2) disajikan pada Tabel 21 berikut:



Tabel 21. Sasaran, Indikator, Target dan Penanggungjawab Komponen kegiatan SMKKN Makassar Tahun 2020-2024

Komponen kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Penanggungjawab Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Terselenggaranya Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		Kepala Sekolah
	Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 502 orang	502	Kepala Sekolah
	Jumlah dokumen dan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan	20	Wakasek bidang kurikulum Wakasek bidang kesiswaan Wakasek bidang humas Wakasek bidang sarpras
Penyelenggaraan Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Terselenggaranya Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		Kasubag Tata Usaha
	Jumlah layanan dukungan penyelenggaraan pendidikan 60 bulan	60	Kasubag Tata Usaha
	Jumlah dokumen dan laporan dukungan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan	20	Kour. Keuangan Kour. Kepegawaian Kour. rumah tangga & perlengkapan Kour. umum & persuratan
	Jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan 14 kegiatan	14	Pokja ULP/Pejabat Pengada

Upaya pencapaian sasaran kinerja unit kegiatan yang direncanakan SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 terapkan melalui indikator dan target kinerja komponen kegiatan penyelenggaraan pendidikan yaitu jumlah lulusan tenaga teknis menengah kehutanan (502 orang) dan jumlah dokumen dan laporan kegiatan sebanyak 20 kegiatan. Jumlah dokumen dan laporan kegiatan sebanyak 20 kegiatan selama



5 tahun tersebut berasal dari aktivitas kelompok pengelola kegiatan kurikulum (1), kesiswaan (2), humas dan kerjasama pendidikan (3) dan kelompok pengelola kegiatan sarana prasarana pendidikan (4).

Untuk indikator kinerja komponen kegiatan penyelenggaraan dukungan pendidikan selama 5 tahun (2020-2024) terdiri atas; jumlah layanan dukungan penyelenggaraan 60 bulan layanan, jumlah dokumen dan laporan dukungan pendidikan 20 kegiatan dan jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan 14 kegiatan. Jumlah dokumen dan laporan dukungan pendidikan sebanyak 20 kegiatan dihasilkan dari aktivitas kelompok pengelola kegiatan dukungan urusan keuangan (1), kepegawaian (2), rumah tangga dan perlengkapan (3) dan dukungan urusan umum dan persuratan (4). Selanjutnya indikator kinerja dukungan pengadaan barang dan jasa 14 kegiatan selama 5 tahun adalah berasal dari aktivitas kelompok pengelola kegiatan dukungan pengadaan kendaraan (1), pengadaan peralatan dan barang inventaris (2) dan pengadaan gedung dan bangunan (3).

C. Kerangka Pendanaan

Rencana alokasi anggaran SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 dalam rangka untuk menunjang unit kegiatan penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan (UK1) diperkirakan sebesar Rp. 118 Milyar untuk memenuhi 2 (dua) komponen kegiatan yakni penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (EK1) dan penyelenggaraan dukungan pendidikan menengah kejuruan kehutanan (EK2), dengan rincian seperti pada Tabel 22.

Tabel 22. Rencana Alokasi Pembiayaan SMK Kehutanan Negeri Makassar Tahun 2020-2024

Unit dan Komponen kegiatan	Sasaran Unit dan Komponen kegiatan	Indikator	Alokasi (Milyar)					Total (Milyar)
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyediaan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (UK1)	Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan	Jumlah lulusan Tenaga Teknis Menengah Kehutanan 503 orang	20,118	21,742	23,885	25,710	26,918	118,373
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (EK1)	Terselenggaranya pendidikan menengah kejuruan kehutanan	a. Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 503 orang						



Unit dan Komponen kegiatan	Sasaran Unit dan Komponen kegiatan	Indikator	Alokasi (Milyar)					Total (Milyar)
			2020	2021	2022	2023	2023	
		b. Jumlah dokumen dan laporan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan						
Penyelenggaraan Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (EK2)	Terselenggaranya dukungan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	<p>a. Jumlah layanan dukungan penyelenggaraan pendidikan 60 bulan</p> <p>b. Jumlah dokumen dan laporan dukungan penyelenggaraan pendidikan 20 kegiatan</p> <p>c. Jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan 14 kegiatan</p>						

Alokasi anggaran sebagaimana Tabel 22 di atas dibutuhkan untuk pencapaian sasaran unit kegiatan SMK Kehutanan Negeri Makassar selama 5 tahun (2020-2024) yaitu tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan dengan indikator kinerja untuk menghasilkan jumlah lulusan tenaga teknis menengah kehutanan sebanyak 503 orang yang memerlukan total dukungan anggaran sebesar Rp. 118,373 milyar.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja unit kegiatan ditunjang oleh dua komponen kegiatan dengan sasaran terselenggaranya pendidikan dan dukungan pendidikan menengah kejuruan kehutanan.



Adapun indikator kinerja komponen kegiatan penyelenggaraan pendidikan yaitu jumlah lulusan tenaga teknis menengah kehutanan (503 orang) dan jumlah dokumen dan laporan kegiatan sebanyak 20 kegiatan. Jumlah dokumen dan laporan kegiatan sebanyak 20 kegiatan selama 5 tahun tersebut berasal dari aktivitas kelompok pengelola kegiatan kurikulum (1), kesiswaan (2), humas dan kerjasama pendidikan (3) dan kelompok pengelola kegiatan sarana prasarana pendidikan (4).

Untuk indikator kinerja komponen kegiatan penyelenggaraan dukungan pendidikan selama 5 tahun (2020-2024) terdiri atas; jumlah layanan dukungan penyelenggaraan 60 bulan layanan, jumlah dokumen dan laporan dukungan pendidikan 20 kegiatan dan jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan 14 kegiatan. Jumlah dokumen dan laporan dukungan pendidikan sebanyak 20 kegiatan dihasilkan dari aktivitas kelompok pengelola kegiatan dukungan urusan keuangan (1), kepegawaian (2), rumah tangga dan perlengkapan (3) dan dukungan urusan umum dan persuratan (4). Selanjutnya indikator kinerja dukungan pengadaan barang dan jasa 14 kegiatan selama 5 tahun adalah berasal dari aktivitas kelompok pengelola kegiatan dukungan pengadaan kendaraan (1), pengadaan peralatan dan barang inventaris (2) dan pengadaan gedung dan bangunan (3).



BAB V. PENUTUP

Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah, termasuk masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus menjadi bagian dari strategi membangun keunggulan kompetitif di daerah. Hal tersebut merupakan wujud nyata implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengembangan SDM menjadi salah satu fokus perhatian dan kunci bagi perbaikan kinerja birokrasi pemerintah sampai kepada tingkat tapak.

Pengembangan pendidikan menengah kejuruan kehutanan dilakukan dalam upaya menghasilkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki kompetensi dibidang teknis kehutanan dan memiliki peran penting di tingkat tapak. Langkah pembaruan pengembangan SDM ke depan harus mampu menggeser perspektif lama dari manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menjadi perspektif pengembangan ASN (human resource development), pola baru manajemen ASN, pengembangan kapasitas masyarakat pelaku utama pembangunan dalam menjawab berbagai tantangan kekinian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



LAMPIRAN

Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
	SS.4 - Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik													
	IKU.19 - Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK													
Program 2. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK														
	SP.2 - Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK													



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	IKP.2 - Peningkatan kompetensi dan Sertifikasi SDM LHK	Orang	9782	10683	10683	10683	10683							BP2SDM	
Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan															
	SK.3 – Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan														
	IKK.9 - Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	472	473	473	473	473							BP2SDM	
	Output 1 - Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	94	105	99	101	102	14,053	15.913	20.656	26.324	26.918	SMKKN Makassar		
	Komponen 1 - Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan							7.498	9.798	14.702	19.946	17.181			



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Output Komponen 1.a - Jumlah lulusan tenaga teknis menengah kejuruan Kehutanan	Orang	94	104	101	102	102							
	Output Komponen 1.b - Jumlah dokumen dan laporan penyelenggaraan pendidikan	Kegiatan	4	4	4	4	4							
	Komponen 2 - Penyelenggaraan Dukungan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan							6.555	6.023	10.162	6.378	9.737		
	Output Komponen 2.a - Jumlah layanan dukungan penyelenggaraan pendidikan	Bulan	12	12	12	12	12							
	Output Komponen 2.b - Jumlah dokumen dan laporan dukungan penyelenggaraan pendidikan	Kegiatan	4	4	4	4	4							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Output Komponen 2.c - Jumlah pengadaan barang/jasa dukungan penyelenggaraan pendidikan	Kegiatan	3	3	3	3	2							